

Urgensi Etika Islam dalam Politik Kontemporer

Miftah Arif Setyawan¹, Muh. Saldi Azizal Adiyat Sulkifli²,
Titik Jauhar Firdha Rain³, Kurniati⁴

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: 10200122088@uin-alauddin.ac.id

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: 10200122083@uin-alauddin.ac.id

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: 10200122085@uin-alauddin.ac.id

⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: kurniati@uin-alauddin.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
06-07-2024

Direvisi:
29-07-2024

Diterima:
31-07-2024

ABSTRACT

Political ethics problems that often arise, such as violations of the code of ethics during general elections, show the importance of integrating Islamic ethical values to achieve better governance free from internal conflict. The aim of this research is to explore the influence of the application of Islamic ethical concepts in the Indonesian political system. This research also aims to increase insight into how Islamic ethics can influence the political system in Indonesia and how its implementation can reduce ethical conflicts in government. This research uses library research methods. This method involves collecting data from various reading sources such as books, scientific articles, and other reading sources. That the concept of Islamic ethics has significant relevance in government politics in Indonesia. Islamic ethics, which involves moral and spiritual values, can provide a strong basis for more just and moral political policies. Implementation of ethical laws based on Islamic principles in various institutions can help overcome political ethical challenges and improve the quality of government. These findings indicate that the application of Islamic ethics can be a solution to improving integrity and ethics in Indonesian politics.

Keywords : Islamic Ethics, Politics, Indonesia, Political Ethics

ABSTRAK

Permasalahan etika politik yang sering muncul, seperti pelanggaran kode etik selama pemilihan umum, menunjukkan pentingnya pengintegrasian nilai-nilai etika Islam untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik dan bebas dari konflik internal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pengaruh penerapan konsep etika Islam dalam sistem politik Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang bagaimana etika Islam dapat mempengaruhi sistem politik di Indonesia dan bagaimana pengimplementasiannya dapat mengurangi konflik etika dalam pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research*. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber bacaan seperti buku, artikel ilmiah, dan sumber bacaan lainnya. Bahwa konsep etika Islam memiliki relevansi yang signifikan dalam politik pemerintahan di Indonesia. Etika Islam, yang melibatkan nilai-nilai moral dan spiritual, dapat memberikan dasar yang kuat untuk kebijakan politik yang lebih adil dan bermoral. Implementasi hukum yang beretika berdasarkan prinsip-prinsip Islam di berbagai institusi dapat membantu mengatasi tantangan etika politik dan meningkatkan kualitas pemerintahan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan etika Islam dapat menjadi solusi untuk meningkatkan integritas dan etika dalam politik Indonesia.

Kata Kunci : Etika Islam, Politik, Indonesia, Etika Politik

Corresponding Author : Miftah Arif Setyawan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl Sultan Alauddin No. 63, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, e-mail: 10200122088@uin-alauddin.ac.id

PENDAHULUAN

Konsep perubahan hukum yang dibawa oleh hukum Islam adalah cerminan dari tujuan dan hakikat hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah stabilitas kehidupan di dunia yang sesuai dengan maksud Tuhan sebagai pembuat syari'at (Kurniati, Andi Moh Rezuki Darma, Misbahuddin, 2023). Agama Islam hadir di tengah bangsa Arab yang sedang merosot etikanya. Islam datang dengan membawa misi utama perbaikan etika bangsa Arab yang telah jauh menyimpang dari peradaban manusia. Misi utama nabi Muhammad diutus sebagai Rasul Islam terakhir yang diturunkan Allah untuk menuntun dan membimbing gejala ambisi manusia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *Innama buitstu li utammima makarima al akhlaq*, artinya: tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan Akhlak. Secara umum, etika merupakan ilmu baik dan buruk, dan tentang hak dan kewajiban. Selanjutnya, Etika juga sebagai kumpulan asas nilai yang berkenaan dengan perbuatan, tindakan dan sikap. Menurut Socrates, "etika merupakan penilaian yang baik tidak berdasarkan sebab-akibat, akan tetapi prinsip batin atau kesenangan jiwa merupakan salah satu komponennya". Aristoteles mengatakan bahwa: "etika merupakan satu nilai yang memiliki tujuan kebahagiaan dalam hidup" (Santoso, 2013).

Sebagaimana etika, politik dimaknai sebagai konsep yang berkenaan dengan pemerintahan. Makna politik disini mengandung nilai estetik dan buruk yang memerlukan seperangkat unsur, seperti halnya menjalankan pemerintahan, mengatur pola aktivitas keseharian masyarakat. Politik seyogyanya dapat mengukur perilaku buruk dan baik manusia, serta mengatur perilaku hidup tersebut ke arah yang lebih baik lagi. Dalam arti yang filosofis, politik memiliki peran dan fungsi ganda, dituntut untuk berbuat baik kesesama manusia, pada saat yang sama juga kebijakan negara harus mempertimbangkan kebaikan masyarakat yang lebih luas. Politik bukanlah bertujuan untuk kekuasaan belaka, melainkan juga untuk mewujudkan kesejahteraan secara umum. Bila diamati lebih lanjut, politik dan etika memiliki relasi yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya ibarat dua sisi yang saling membutuhkan. Ketika yang satu terapung maka satu sisi lainnya akan tenggelam (Sutikno, 2019).

Para pemikir politik Islam, politik terkait erat dengan etika. Bedanya, jika pemikir Yunani membicarakan keterkaitan itu dalam wilayah filsafat moral, pemikir politik Islam mendiskusikannya dalam naungan teologi. Ini indikasi, bahwa bagi Islam persoalan politik tidak terpisah dengan persoalan agama (Riyantie, 2020).

Islam serta politik tidak boleh dipisahkan, sebab Islam tanpa politik akan melahirkan kaum muslimin yang tidak memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan syariat Islam. Begitupun dengan politik tanpa Islam, hanya akan melahirkan rakyat yang gila akan kekuasaan, jabatan, dan duniawi saja. Oleh sebab itu, politik dalam Islam sangat penting dalam mengingatkan kemerdekaan dalam menjalankan syariat Islam yang diwadahi oleh politik. Pemikiran Politik pada Islam berkembang seiring pada perkembangan zaman.

Etika politik tidak hanya menyangkut masalah perilaku politikus, tetapi juga berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, ekonomi. Karena, perilaku politikus hanya salah satu dimensi etika politik. Sebuah kehendak yang baik, perlu didukung institusi yang adil. Dan kehendak baik berfungsi mempertajam makna tanggung jawab, sedangkan institusi (hukum, aturan, kebiasaan, lembaga sosial) berperan mengorganisir tanggung jawab (IN'AMUZZAHIDIN, 2016). Etika politik tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan suatu sistem moral individu, sikap moral, ataupun suatu norma sebagai dasar negara. Dalam arti tidak mengembangkan prinsip-prinsip moral politik secara mengawang-awang dan hanya mengandalkan rasionalitas semata. Akan tetapi, etika berangkat dari realitas terutama pada tataran realitas yang telah dikaji berdasarkan

ilmu politik. Etika politik memberi argumentasi lebih lanjut tentang berbagai konsep yang telah dirumuskan ilmu politik (Malik & Rahim, 2023).

Hakikat Etika politik sendiri adalah usaha untuk memberikan penilaian moral atas tindakan-tindakan politik, memberikan gambaran tentang apa yang menjadi inti dari keadilan, dan apa yang kemudian menjadi dasar etis dari kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu harus dijalankan. Di sinilah kemudian Islam dapat berkontribusi menyuntikkan semangat penyempurnaan akhlak, dan membangun sistem etika yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah (Rizky HK, 2020).

Tujuan penelitian ini untuk menggali konsep etika Islam jika diterapkan di Indonesia. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan dalam tulisan ini antara lain: 1) bagaimana konsep etika Islam diterapkan dalam berpolitik di Indonesia; 2) bagaimana pengimplementasian etika politik Islam dalam sistem politik di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagaimana etika Islam dapat mempengaruhi sistem politik yang ada di Indonesia, sehingga pemerintahan Indonesia tidak ada konflik internal dalam masalah etika politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis riset kepustakaan atau *library research*. Riset kepustakaan atau *library research* sering juga disebut sebagai studi pustaka atau literatur yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dari berbagai sumber bacaan seperti buku - buku, artikel ilmiah, dan sumber bacaan lainnya untuk menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian (Zed, 2008). Adapun alasan tim peneliti memilih penelitian dengan studi pustaka atau literatur adalah jenis penelitian ini dinilai yang paling relevan untuk menjawab dan menganalisis permasalahan yang sekarang sedang terjadi terkait etika politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Etika Islam dalam Politik Pemerintahan di Indonesia

Secara etimologis, menurut Endang Syaifuddin Anshari, etika berarti perbuatan dan berkaitan dengan kata-kata "Khuliq" (pencipta) dan "Makhluq" (yang diciptakan). Selain itu, istilah etika juga diartikan berasal dari kata jamak dalam bahasa Arab "Akhlaq," yang bentuk tunggalnya adalah "khulqu," yang berarti perangai, budi, tabiat, dan adab. Menurut Franz Magnis Suseno, etika berbeda dari ajaran moral. Ajaran moral langsung mengajarkan bagaimana seseorang harus hidup melalui rumusan sistematis mengenai apa yang dianggap bernilai dan kewajiban manusia, sedangkan etika adalah ilmu tentang nilai-nilai moral, yang sebenarnya adalah filsafat tentang bidang moral. Jadi, etika adalah ilmu, bukan ajaran, tetapi merupakan refleksi sistematis tentang pandangan dan istilah-istilah moral. Dengan demikian, etika adalah jenjang upaya manusia untuk menyesuaikan tindakannya dengan aturan yang berlaku (Sulaiman, 2021).

Melihat hubungan antara etika politik dan upaya menumbuhkan prinsip moral, masalah moral atau akhlak menjadi penting sebagai panduan berpolitik di Indonesia agar para politisi dan partai politiknya bermanfaat bagi kepentingan umat. Agama sebagai sumber etika-moral (akhlak) didukung oleh mereka yang lebih mengutamakan orientasi kebangsaan daripada orientasi keagamaan. Orientasi ini hanya mendukung pelaksanaan etika-moral agama dan menolak formalisasi agama dalam kehidupan bernegara. Posisi agama sebagai sumber pembentukan etika-moral bertujuan agar bangsa ini memiliki landasan filosofis yang jelas tentang etika-moral, bukan hanya berdasarkan kriteria baik dan buruk yang bisa sangat subjektif atau temporal.

Realitas sosial politik di Indonesia saat ini menunjukkan adanya tiga penyakit besar yang menggerogoti bangsa dan negara: korupsi, terorisme, dan narkoba. Jika ketiga penyakit ini tidak ditangani dengan serius, eksistensi bangsa dan negara ini akan terancam. Fenomena ini dihubungkan dengan mayoritas rakyat Indonesia yang beragama Islam, dimana para pelaku korupsi dan terorisme umumnya adalah orang-orang ber-KTP Islam yang seharusnya tidak melakukan perbuatan buruk tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menghasilkan penelitian dan pembahasan yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat berupa pemahaman atau pencerahan agar terhindar dari perbuatan buruk dan menaati aturan, khususnya dalam politik yang dinilai berdasarkan moralitas politik dalam konteks Indonesia dan ajaran agama Islam. Selain itu, penting untuk memahami eksistensi etika politik kebangsaan ala Indonesia yang dianggap Islami atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. (Abdul Hafid et al., 2020)

Islam telah banyak mengatur etika dan moral kepemimpinan dalam Alquran, hadis Nabi Muhammad SAW, dan ijma ulama. Semua ajaran etika dan moral dalam masyarakat adalah etika dan moral kepemimpinan, dengan inti amanah dan keadilan. Etika dan moral kepemimpinan sangat ditentukan oleh penguasa. Oleh karena itu, pemerintah yang adil dan beretika harus belajar dari realitas etika politik seperti:

1. Etika Politik dalam Sistem Politik Madani

Konsep masyarakat madani sejalan dengan etika politik Islam dan demokrasi, menghendaki:

- a. Legislatif berfungsi sebagai pemikir dan perumus kepentingan rakyat, berupaya menciptakan keamanan, ketertiban, ketenangan, dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Yudikatif yang jujur, adil, terpercaya, mampu menjatuhkan sanksi yang adil tanpa memandang jabatan.
- c. Eksekutif yang fungsional, bersih, jujur dalam melaksanakan mandat rakyat.
- d. Masyarakat jujur dan berani berkata benar dalam menyampaikan tuntutan dan taat pada aturan untuk mensejahterakan masyarakat.

2. Menurut Plato

Prinsip-prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan sosial, persamaan, pengakuan, dan perlindungan hak asasi manusia. Kekuasaan adalah amanah, sehingga Islam melarang penyalahgunaan kekuasaan. Pemegang kekuasaan atau pemimpin harus berlaku adil dalam arti yang sesungguhnya (Maloko, 2013).

B. Pengimplementasian etika politik Islam dalam Sistem Politik di Indonesia

Islam seringkali dipahami sebagai sebuah sistem aturan politik yang bersifat eksklusif, bahkan dalam kasus ekstrem hanya dianggap sebagai alat pendukung legitimasi kekuasaan. Ketika Islam menjadi ideologi politik, hal ini dapat menimbulkan ketakutan terhadap istilah politik Islam, yang sering kali diasosiasikan dengan dominasi dan otoritarianisme serta penindasan terhadap minoritas nonmuslim. Meskipun demikian, Islam juga memiliki potensi untuk berfungsi sebagai solusi etis dan moral yang lebih demokratis (Effendi, 2003).

Dalam konteks hubungan antara Islam dan negara, Munawir Sjadzali dalam Azhar (2007) mengelompokkan pemikiran Islam ke dalam tiga aliran. Aliran pertama meyakini bahwa Islam adalah agama yang omnipresen, mengatur seluruh aspek kehidupan seorang Muslim dan menawarkan solusi untuk semua masalah, termasuk politik. Aliran kedua berpendapat bahwa Islam adalah ajaran agama yang tidak mengatur urusan politik, hanya mengatur hubungan antara makhluk dan Pencipta. Aliran ketiga merupakan sintesis dari kedua pandangan tersebut, menyatakan bahwa Islam tidak memiliki panduan sistem politik dan ketatanegaraan, tetapi menyediakan nilai-nilai etis bagi kehidupan bernegara (Azhar, 2007).

Dalam konteks negara Indonesia etika politik juga bersumber dari dasar Negara, yaitu Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai dasar Negara juga sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam menjalankan suatu kegiatan entah itu untuk melaksanakan proses ketatanegaraan dan dasar pembuatan undang-undang atau kebijakan serta pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku berdasarkan nilai-nilai sosial yang adil dan beradab. Berpegang teguh terhadap agama yang diyakininya. Serta ajaran etika pada seorang pemimpin untuk dapat menjadi seorang pemimpin yang hitmat, bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan (Munawir Sjadzali, 1990).

Pengimplementasian etika politik Islam dalam sistem politik di Indonesia adalah topik yang relevan dalam konteks negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Indonesia, sebagai negara demokrasi yang pluralistik, menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan nilai-nilai keagamaan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Etika politik Islam berperan penting dalam membentuk norma-norma dan perilaku politik yang berlandaskan pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kesejahteraan, dan kebijaksanaan (Anwar, 2010).

Etika politik Islam, yang berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil dan berintegritas, perlindungan terhadap hak-hak individu, serta tanggung jawab sosial dan moral pemimpin terhadap rakyatnya. Di Indonesia, nilai-nilai ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan program pemerintah, serta dalam partisipasi politik masyarakat (Hadi, 2010).

Salah satu contoh penerapan etika politik Islam di Indonesia adalah dalam sistem pemilihan umum. Etika politik Islam menekankan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki akhlak mulia dan kompetensi untuk memimpin. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menuntut transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas dalam proses pemilihan. Sebagai contoh, pemilihan kepala daerah dan presiden di Indonesia dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang mencerminkan prinsip musyawarah dan kesepakatan dalam Islam (Muhtadi, 2007).

Selain itu, etika politik Islam juga mempengaruhi kebijakan sosial dan ekonomi di Indonesia. Misalnya, program-program kesejahteraan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan program keluarga harapan (PKH) dapat dilihat sebagai implementasi prinsip-prinsip keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi dalam Islam. Etika politik Islam mendorong pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat, khususnya kelompok yang kurang mampu dan termarginalkan (Hasan, 2009). Adanya BLT dan PKH ini merupakan implementasi dari nilai-nilai keadilan yang dijunjung oleh Islam sebagaimana termaktub dalam surah Al-Maidah ayat 8.

Di bidang hukum, etika politik Islam juga berperan dalam pembentukan undang-undang yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan keadilan. Misalnya, penerapan hukum zakat sebagai bagian dari sistem perpajakan di Indonesia merupakan upaya untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata dan pengurangan kesenjangan sosial. Hukum zakat ini mengharuskan umat Islam untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan, yang sejalan dengan ajaran Islam tentang solidaritas sosial dan kesejahteraan bersama (Yasin, 2016).

Namun, pengimplementasian etika politik Islam di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keragaman interpretasi ajaran Islam yang dapat menimbulkan perbedaan pandangan dan konflik. Selain itu, ada juga tantangan dalam memastikan bahwa penerapan etika politik Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Misalnya, dalam kasus penegakan hukum syariah di

beberapa daerah di Indonesia, terdapat kekhawatiran bahwa penerapannya dapat melanggar hak-hak individu dan kebebasan beragama (Nashir, 2007).

Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi Indonesia untuk terus mengembangkan dialog dan kerja sama antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk ulama, intelektual, dan politisi. Hal ini akan membantu memastikan bahwa etika politik Islam dapat diterapkan secara inklusif dan harmonis dalam sistem politik yang demokratis. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi tentang etika politik Islam perlu diperkuat agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai universal yang terkandung dalam ajaran Islam (Hanafi, 2020).

Hakikat Etika politik sendiri adalah usaha untuk memberikan penilaian moral atas tindakan-tindakan politik, memberikan gambaran tentang apa yang menjadi inti dari keadilan, dan apa yang kemudian menjadi dasar etis dari kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu harus dijalankan. Di sinilah kemudian Islam dapat berkontribusi menyuntikkan semangat penyempurnaan akhlak, dan membangun sistem etika yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah (Suseno, 1988).

Penerapan hukum etika secara langsung berkaitan dengan norma hukum lain yang menjadi payung sekaligus landasan yang dalam hal ini adalah hukum negara. Negara sebagai entitas yang kuat secara sistemik dapat memberikan pengaruh dan dampak bagi tumbuh kembangnya hukum etika di wilayahnya. Hal ini secara konkret dapat direalisasikan dengan pengaturan perihal hukum etika yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Indonesia sendiri telah merealisasikan implementasi ini pada beberapa bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat melalui pengaturan terkait dengan amanat untuk membentuk suatu sistem hukum etika. Intervensi negara dalam hal memerintahkan penyusunan perangkat-perangkat hukum etika baik kode etik dan institusi peradilan etik atau sejenis menunjukkan betapa negara dapat secara konkret bersumbangsing dalam mempengaruhi sistem hukum etika di masyarakat. Tantangan implementasi hukum etika di Indonesia pada perspektif substansial dapat diatasi setidaknya dengan upaya-upaya kultural dan struktural perihal pentingnya membangun serta menegakkan kewibawaan hukum etika baik di masyarakat maupun institusi. Hukuman atau punishment maupun sanksi etik tidak jarang dipandang dan dianggap sebelah mata oleh beberapa kalangan sehingga hal tersebut seakan hanya berfungsi sebagai stempel semata tanpa menghadirkan dampak jera pada pelaku yang melanggar (El Hakim, 2021).

Pelembagaan hukum etika menjadi salah satu implementasi konkret yang dapat didukung oleh peraturan perundang-undangan pada seluruh institusi dan lembaga baik publik, private maupun sosial kemasyarakatan. Tentu hal ini juga memiliki tantangan dan hambatan turunan baik berupa pemahaman maupun pelaksanaan yang memerlukan sumber daya agar hukum etika dengan asas-asasnya dapat dibentuk dengan sebaik-baiknya. Namun kendala tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak menerapkan dan mengaplikasikan hukum etika beserta asas-asas umumnya pada suatu lembaga terlebih ketika hal tersebut memiliki relevansi formal yang diperintahkan secara konstitusional. Politik memungkinkan individu atau kelompok melakukan beberapa hal yang tanpanya mereka tidak biasa melakukannya, dan politik juga membatasi individu atau kelompok dari melakukan apa yang jika tidak ada politik, mereka akan biasa melakukannya. Politik itu jauh lebih luas dibanding apa yang dilakukan pemerintah (Hefner, 2000).

Etika politik bukan hanya masalah moral individual, karena moral individual merupakan hubungan antara visi seseorang dan juga tindakannya secara langsung. Seseorang dapat menerapkan secara langsung di dalam tindakannya bila mempunyai pandangan tertentu. Apabila tuntutan norma terpenuhi, maka bisa dilakukan dengan tindakan. Sedangkan etika politik merupakan masalah etika sosial yang tidak bisa dilepaskan dari tindakan kolektif,

struktur sosial, serta diterima oleh sebagian besar dari anggota masyarakat. Meskipun seseorang memiliki gagasan yang bagus belum tentu bisa diterapkan dalam tindakan kolektif, sehingga perlu proses persuasif agar bisa diterima oleh anggota masyarakat. Hubungan antara visi dan tindakan tidak langsung, melainkan harus melewati proses mediasi dengan menggunakan simbol-simbol dan nilai-nilai seperti agama, demokrasi, keadilan, solidaritas, dan kebebasan. Nilai-nilai dan juga simbol-simbol tersebut membantu mencapai kesepakatan untuk bertindak. Etika politik sangat terkait dengan motivasi, sarana, dan tujuan tindakan kolektif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor obyektif seperti struktur sosial yang dapat mempermudah atau menghambat tindakan kolektif (Muamar, 2007).

Secara keseluruhan, pengimplementasian etika politik Islam dalam sistem politik di Indonesia menawarkan peluang untuk membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan beradab. Namun, hal ini juga memerlukan komitmen dan usaha bersama dari semua pihak untuk mengatasi tantangan dan memastikan bahwa nilai-nilai etika politik Islam dapat diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan.

PENUTUP

Etika politik di Indonesia, terutama yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sangat penting dalam memandu perilaku para pegiat politik dan pemimpin. Etika politik mengacu pada prinsip-prinsip moralitas yang harus dipegang teguh dalam berpolitik, termasuk amanah, keadilan, dan pelayanan kepada rakyat. Nilai-nilai ini tidak hanya berlandaskan pada ajaran agama, tetapi juga mendukung konsep masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan.

Etika politik membahas penilaian moral terhadap tindakan politik serta prinsip keadilan dalam penggunaan kekuasaan. Islam, sebagai ideologi politik, dapat menawarkan solusi moral dan etis yang demokratis, tidak hanya sebagai alat legitimasi kekuasaan. Di Indonesia, implementasi hukum etika melalui peraturan perundang-undangan mendukung pembangunan nilai-nilai sosial yang adil dan beradab sesuai dengan Pancasila. Meskipun tantangan substansial terkait pemahaman dan pelaksanaan masih ada, upaya pelembagaan hukum etika di berbagai sektor merupakan langkah konkrit dalam memperkuat tata nilai etis dalam berpolitik dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafid, Pikahulan, R., & Hasyim, H. (2020). Etika Hukum Dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam: Moralitas Politik Pancasila. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(1), 70–89. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1202>
- Anwar, M. S. (2010). *Islam dan Demokrasi di Indonesia: Toleransi tanpa Liberalisme*. Jurnal Islam Indonesia, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Azhar, M. (2007). Relasi Agama dan Negara dalam perspektif Mohammed Arkoun'. *Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 6.1, 183–184.
- Effendi, Bahtiar. (2003). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Paramadina.
- El Hakim, H. M. I. (2021). Pemantapan Dimensi Etika Dan Asas Sebagai Penguatan Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2(3), 155–170. <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i3.18041>
- Hadi, Amirul. (2010). *Islam dan Politik di Indonesia: Pergulatan antara Idealisme dan Realitas*. UIN Jakarta Press.
- Hanafi, H. (2020). *Pengaruh Etika Islam terhadap Kebijakan Publik di Negara Mayoritas Muslim*. Jurnal Studi Islam Kontemporer, Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Hasan, N. (2009). *Islamizing Formal Education: Integrated Islamic Schools and a New Trend in Formal Education Institution in Indonesia*. Studia Islamika, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hefner, R. W. (2000). *Islam Sipil: Muslim dan Demokratisasi di Indonesia*. Universitas Princeton.
- IN'AMUZZAHIDIN, MUH. (2016). Etika Politik Dalam Islam. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(2), 89. <https://doi.org/10.21580/wa.v2i2.382>
- Kurniati, Andi Moh Rezki Darma, Misbahuddin. (2023). Konsep Hukum Islam Dalam Mewujudkan Stabilitas Dan Perubahan Dalam Masyarakat. *JPM Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(1), 120.
- Malik, A., & Rahim, A. (2023). *Urgensi Etika Politik Menurut Ibnu Khaldun dalam Implementasinya di Indonesia*. 6, 3599–3610.
- Maloko, M. T. (2013). Al-Daulah. *Al-Daulah*, 1(2), 50–59.
- Muamar, M. (2007). *Pemikiran Nurcholis Madjid tentang etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara*. Institut Agama Islam NegeriWalisongo. Semarang.
- Muhtadi, Burhanuddin. (2007). *Dinamika Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Islamisme*. Pustaka Alvabet.
- Munawir Sjadzali. (1990). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. UIPres.
- Nashir, Haedar. (2007). *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. PSAP.
- Riyantie, Y. R. (2020). *KONSEP POLITIK MACHIAVELLI DALAM PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM* [Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/11148/>
- Rizky HK, M. (2020). Membaca Pemikiran Taha Abdurrahman Tentang Etika Politik Islam. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 3(2), 273–286. <https://doi.org/10.20414/politea.v3i2.2339>
- Santoso, M. A. F. (2013). Kontribusi Etika Islam pada Pendidikan Politik: Solusi bagi Problema Civil Society Indonesia Era Reformasi. *Tsaqafah*, 9(2), 225. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i2.51>
- Sulaiman, R. (2021). *Implementasi Etika Islam dalam Pengambilan Keputusan Politik*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

- Suseno, F. M. (1988). *Etika Politik ; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. PT Gramedia.
- Sutikno. (2019). Perspektif Etika Kritis-Liberatif Dalam Teologi. *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 3(2), H. 119-137.
- Yasin, M. (2016). *Dinamika Etika Politik Islam di Era Globalisasi*. Jakarta: LIPI.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.